

EMPOWERMENT OF *LURIK BATIK* CRAFTSMEN THROUGH ONE VILLAGE ONE PRODUCT (OVOP) APPROACH TO INCREASE VILLAGE COMMUNITY REVENUES IN CENTRAL JAVA PROVINCE

Risca Cynthiana Sugiyarwati¹

Abstract

The title of this research is the Empowerment of Batik Lurik Craftsmen through One Village One Product (OVOP) Approach in Increasing the Income of Villagers of Jambakan, Bayat Sub-District, Klaten Regency, Central Java Province. Modern Batik handcraft increasing in Central Java pressing Batik Lurik which is traditional Batik from Klaten Regency. The production of Batik Lurik still using traditional method ATBM (No Machine Tenun Tool) and must through 5 steps and it takes long times and it makes reducing public interest to become a craftsmen and it result limited Lurik Batik production. Results showed that the empowerment of batik lurik craftsmen through One Village One Product (OVOP) approach in increasing the income of the people of Jambakan Village, Bayat Sub-district, Klaten Regency has been implemented quite optimal. As proved by the following aspects: 1. Possibility, realization of stable economic situation and encouraging the development of Batik Lurik; 2. affirmation, has been as the implementing of training programs for improving the quality of human resources; 3. Protection, the establishment of the product of local law as a form of protection of local products; 4. Supporting, the implementation of the provision of capital assistance and equipment assistance for the craftsmen even though Batik Lurik is limited; And 5. Maintenance, the implementation of exhibition of Batik Lurik and comparative study for Batik Lurik craftsmen although is still not sustainable. The Suggestions that we provide based on the results of the research are to conduct regular monitoring and evaluation of all activities that have been done for the development of the next activity program, improving the promotion and the budgeting.

Keywords: Community Development, One Village One Product, Village Income

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam konsideran menimbang menjelaskan bahwa :

Penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan,

¹ Penulis adalah Praktisi Pemerintahan pada Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah. Dapat dihubungi melalui email: risca.chyntia20@gmail.com



pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sebagaimana dikemukakan oleh Rasyid (dalam Sumaryadi, 2010:22) bahwa pemerintahan mengemban 3 (tiga) fungsi hakiki yaitu: “pelayanan, pemberdayaan, dan pembangunan (*service, empowerment, development*).” Hal tersebut dilaksanakan dengan maksud pelayanan mampu memberikan keadilan bagi masyarakat, pemberdayaan untuk mendorong kemandirian masyarakat, dan pembangunan akan menciptakan kemakmuran dalam masyarakat. Dalam pelaksanaannya pemerintah dituntut mampu bertindak secara seimbang demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Saat ini Pemerintah Indonesia dalam upaya mensejahterakan masyarakatnya lebih terfokus dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat. Salah satu kegiatan pemberdayaan masyarakat yang telah dikenal adalah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM). Namun sejak ditetapkannya Inpres Nomor 6 Tahun 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil Dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah, dikenal istilah *One Village One Product (OVOP)* sebagai salah satu kegiatan pemberdayaan masyarakat. Istilah *One Village One Product (OVOP)* tertuang dalam Lampiran peraturan tersebut yang dijabarkan pada program peningkatan efektifitas pengembangan cluster, sentra Industri Kecil Menengah (IKM) melalui pendekatan *One Village One Product (OVOP)*, yang merupakan bagian dari Sub Pokok Bahasan Peningkatan Peluang Pasar Produk UMKM, dengan Pokok Bahasan Utama yaitu Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia nomor 78/M-IND/PER/9/2007 tentang Peningkatan Efektifitas Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Melalui Pendekatan Satu Desa Satu Produk (*One Village One Product - OVOP*) di Sentra, pada Pasal 1 angka 5 dijelaskan bahwa Satu Desa Satu Produk (OVOP) adalah suatu pendekatan pengembangan potensi daerah di satu wilayah untuk menghasilkan satu produk kelas global yang unik khas daerah dengan memanfaatkan sumber daya lokal. Pelaksanaan program OVOP di Provinsi Jawa Tengah mengacu pada Instruksi Gubernur Jawa Tengah nomor 518/23546 tahun 2011 tentang Pengembangan Produk Unggulan Daerah Perdesaan Melalui Pendekatan *One Village One Product (OVOP)* Berbasis Koperasi Di Provinsi Jawa Tengah.

Berdasarkan Instruksi Gubernur Jawa Tengah nomor 518/23546 tahun 2011 Pengembangan Produk Unggulan Daerah Perdesaan Melalui Pendekatan *One Village One Product (OVOP)* Berbasis Koperasi di Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Klaten yang terdapat pada nomor 30 tabel 1.1 dapat dilihat memiliki 2 (dua) produk yang memenuhi syarat program OVOP yaitu ikan nila dan tenun lurik batik. Kedua produk tersebut ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah karena sesuai dengan kriteria pada Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia nomor 78/M-IND/PER/9/2007 tentang Peningkatan Efektifitas Pengembangan Industri Kecil dan



Menengah Melalui Pendekatan Satu Desa Satu Produk (*One Village One Product - OVOP*) di Sentra.

Kabupaten Klaten belum memiliki peraturan tersendiri dalam melaksanakan program OVOP, baik yang menaungi pelaksanaan kegiatan maupun produk-produk yang termasuk dalam program OVOP tersebut. Sebagaimana hasil penelusuran awal peneliti pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Klaten untuk meminta *fotocopy* berkas peraturan yang berkaitan dengan Pelaksanaan *OVOP* di Kabupaten Klaten, pegawai masing-masing instansi menyatakan bahwa tidak ada berkas terkait hal tersebut. Sehingga sampai saat ini Pemerintah Kabupaten Klaten dalam hal ini Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi UMKM masih menggunakan peraturan yang dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Tengah sebagai dasar untuk melaksanakan program OVOP dimaksud.

Adanya keterbatasan aturan yang dapat digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Klaten ditambah dengan belum adanya aturan tersendiri untuk pelaksanaan program OVOP di Kabupaten Klaten menyebabkan belum optimalnya Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi UMKM untuk mengembangkan produk-produk yang termasuk didalam program OVOP hingga saat ini. Pada hasil produksi *Lurik Batik* pada masing-masing pengrajin memiliki tingkat kualitas yang berbeda-beda. Selain itu motif dan model dari *Lurik Batik* yang dihasilkan masih terbatas. Semua itu disebabkan sarana dan prasarana yang digunakan untuk memproduksi *lurik batik* masih sangat tradisional sehingga hasil produksi berdasarkan keahlian tangan dari para pengrajinnya. Setiap pengrajin pastinya mempunyai keahlian, ketelitian, dan kesabaran yang berbeda-beda sehingga produk *lurik batik* yang dihasilkan berbeda-beda kualitasnya. Oleh karena itu dengan adanya perbedaan tersebut hingga saat ini masih belum ditentukan standarisasi hasil produk *Lurik Batik*.

Terlebih lagi masih belum adanya pasar khusus yang menampung ataupun memasarkan hasil produksi *Lurik Batik* tersebut khususnya produk dari Desa Jambakan. Apabila sudah terdapat minimal satu tempat yang difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten Klaten untuk menampung hingga memasarkan produk *Lurik Batik* tersebut maka akan lebih memudahkan bagi pengrajin untuk dapat memasarkan hasil produksinya selain itu bagi pemerintah dalam penentuan standarisasi produk *Lurik Batik* dari masing-masing pengrajin akan lebih mudah ditentukan dan diawasi secara berkesinambungan. Sehingga masyarakat akan lebih termotivasi dan berusaha meningkatkan produksinya baik dalam hal kuantitas maupun kualitas dari produk yang dihasilkannya. Berdasarkan uraian di atas maka masalah dapat dirumuskan 1) Bagaimanakah pemberdayaan pengrajin *Lurik Batik* melalui pendekatan OVOP dalam meningkatkan pendapatan masyarakat di Desa Jambakan Kecamatan Bayat Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah? 2) Faktor apakah yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan pemberdayaan pengrajin *Lurik Batik* melalui pendekatan OVOP dalam meningkatkan pendapatan masyarakat di Desa Jambakan Kecamatan Bayat Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah? 3) Tindak lanjut apa saja



yang dilakukan dalam menangani faktor penghambat pemberdayaan pengrajin Lurik Batik melalui pendekatan OVOP dalam meningkatkan pendapatan masyarakat di Desa Jambakan Kecamatan Bayat Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah?

TEORI

Pemberdayaan Pengrajin Lurik Batik

Pemberdayaan berasal dari kata empowerment yaitu “sesuatu peningkatan kemampuan yang sesungguhnya potensinya ada, dan usahanya adalah dari kurang berdaya menjadi lebih berdaya”. (Sedarmayanti, 2014:286)

Menurut Wasistiono (2001:71) pemberdayaan adalah “upaya membuat orang, kelompok atau masyarakat menjadi berdaya sehingga mampu mengurus kepentingannya sendiri secara mandiri. Dengan demikian inti pemberdayaan adalah menciptakan kemandirian baik dari individu, kelompok maupun masyarakat.”

Sejalan dengan pengertian tersebut Theresia, dkk (2014:94) mengemukakan bahwa pemberdayaan adalah “upaya untuk membangun daya itu sendiri, dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya.” Selanjutnya Theresia, dkk (2014:117) juga mengartikan bahwa pemberdayaan sebagai “upaya memenuhi kebutuhan yang diinginkan oleh individu, kelompok dan masyarakat luas agar mereka memiliki kemampuan untuk melakukan pilihan dan mengontrol lingkungannya agar dapat memenuhi keinginannya, termasuk aksesibilitasnya terhadap sumber daya yang terkait dengan pekerjaannya, aktivitas sosialnya, dll.”

Konsep pemberdayaan diartikan sebagai proses melepaskan situasi atau keadaan ketertekanan, ketidakmampuan, ketidakberdayaan, kehilangan atau ketiadaan otoritas, keterpinggiran, ketersisihan, kebangkitan dari kekalahan, dan hal-hal yang berkaitan dengan kelemahan/ *powerless*. (Sumaryadi. 2010:57)

Parsons, et al (1994 dalam Theresia, 2014:118) menjelaskan pemberdayaan sebagai :

Sebuah proses agar setiap orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam, berbagi pengontrolan atas, dan mempengaruhi, kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya.

Selanjutnya pemberdayaan merupakan proses sebagai akibat dari mana individu mempunyai kemandirian, motivasi, dan keterampilan yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan dalam cara-cara yang memberikannya rasa kepemilikan dan kepuasan dalam mencapai tujuan bersama. (Sumaryadi, 2005:163). Berdasarkan beberapa definisi pemberdayaan di atas dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan adalah suatu proses memberikan daya atau motivasi maupun dorongan terhadap seseorang/individu, organisasi, maupun kelompok usaha/swasta melalui potensi yang ada dengan peningkatan pengetahuan, kemampuan maupun keterampilan sehingga



mampu memiliki kehidupan yang mandiri dan lebih berdaya serta lepas dari situasi atau keadaan tertekanan, ketidakmampuan, ketidakberdayaan, kehilangan serta hal-hal lain yang berkaitan dengan kelemahan/*powerless*.

One Village One Product

Pemberdayaan telah dilaksanakan melalui berbagai macam cara atau program. Salah satu program yang kini telah dilaksanakan adalah program *One Village One Product* (OVOP). Program tersebut merupakan adaptasi dari program yang telah dilaksanakan pada beberapa negara yang pada dasarnya memiliki konsep untuk mengoptimalkan satu produk yang dimiliki oleh suatu daerah atau pada hal ini adalah desa menjadi suatu produk unggulan sehingga mampu menaikkan harga jual dari produk tersebut yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan dari masyarakat pada daerah atau desa tersebut.

One Village One Product (OVOP) adalah suatu pendekatan pengembangan potensi daerah di satu wilayah untuk menghasilkan satu produk kelas global yang unik khas daerah dengan memanfaatkan sumber daya lokal. (Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 78/M-IND/Per/9/2007 pasal 1 ayat 5)

Sumodiningrat dan Wulandari (2015:166) mengemukakan bahwa OVOP adalah sebagai :

Kumpulan orang-orang yang memiliki usaha-usaha yang lebih kurang sama untuk membangun dan bekerja sama dalam satu komunitas, di mana ini merupakan unit terkecil pemerintahan di Indonesia, yaitu desa yang memiliki satu produk unggulan yang diproduksi dan digunakan untuk menghidupi warganya, baik untuk menghidup dirinya sendiri maupun keluarganya, termasuk komunitas-komunitas yang tergabung di dalam OVOP tersebut. Penyebutan satu desa satu produk karena di Indonesia desa merupakan unit pemerintahan terkecil.

Selanjutnya Sumodiningrat dan Wulandari (2015:166-175) menambahkan bahwa OVOP dapat terwujud karena dibangun oleh dasar-dasar yang kokoh, seperti berikut:

1. Kebersamaan karena satu desa
2. *Revitalization of People* (Revitalisasi Desa)
3. *Revitalization of Villages* (Revitalisasi Desa)
4. *Revitalization of Commerce* (Revitalisasi Perdagangan)
5. *Exchange* (Pertukaran)

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 78/M-IND/Per/9/2007 tentang Peningkatan Efektifitas Pengembangan Industri Kecil dan Menengah melalui pendekatan satu desa satu produk (*One Village One Product - OVOP*) di sentra, disebutkan pada pasal 5 bahwa :

Produk IKM yang dipilih untuk dikembangkan dengan pendekatan OVOP harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. produk unggulan daerah dan/atau produk kompetensi inti daerah;



- b. unik khas budaya dan keaslian lokal;
- c. bermutu dan berpenampilan menarik;
- d. berpotensi pasar domestik dan ekspor; dan
- e. diproduksi secara kontinyu dan konsisten.

Pelaksanaan Satu Desa Satu Produk (OVOP) jika di dasarkan pada peraturan tersebut di atas tidak dapat serta merta dilakukan begitu saja, namun harus memenuhi kriteria yang telah ditetapkan sehingga nantinya benar-benar mampu menjadi produk unggulan dan akhirnya meningkatkan pendapatan masyarakat pada daerah atau desa tersebut.

Pendapatan Masyarakat

Pendapatan masyarakat merupakan salah satu indikator dari tingkat kesejahteraan masyarakat. Meskipun indikator pendapatan ini tidak mutlak atas tingkat kesejahteraan masyarakat namun cukup untuk menunjukkan bahwa masyarakat telah sejahtera atau belum.

Budiono (1992: 180) mengemukakan bahwa “Pendapatan adalah hasil dari penjualan faktor-faktor produksi yang dimilikinya kepada sektor produksi”

Menurut Sukirno (2006:47) pendapatan adalah jumlah penghasilan yang diterima oleh penduduk atas prestasi kerjanya selama satu periode tertentu, baik harian, mingguan, bulanan ataupun tahunan. Beberapa klasifikasi pendapatan antara lain:

1. Pendapatan pribadi, yaitu; semua jenis pendapatan yang diperoleh tanpa memberikan suatu kegiatan apapun yang diterima penduduk suatu Negara.
2. Pendapatan disposibel, yaitu; pendapatan pribadi dikurangi pajak yang harus dibayarkan oleh para penerima pendapatan, sisa pendapatan yang siap dibelanjakan inilah yang dinamakan pendapatan disposibel.
3. Pendapatan nasional, yaitu; nilai seluruh barang-barang jadi dan jasa-jasa yang diproduksi oleh suatu Negara dalam satu tahun.

Masyarakat menurut Suharto (2014:47) yakni “Sekelompok orang yang memiliki perasaan yang sama atau menyatu satu sama lain karena mereka saling berbagi identitas, kepentingan-kepentingan yang sama, perasaan memiliki, dan biasanya satu tempat yang sama”

Menurut Soekanto (2012: 133), masyarakat adalah yang bertempat tinggal disuatu wilayah dengan batas-batas tertentu, dimana faktor utama yang menjadi dasarnya adalah interaksi dengan penduduk diluar batasnya.

Fauzi (2010:67) menjelaskan bahwa “Pendapatan masyarakat tercipta oleh suatu pengeluaran rumah tangga keluarga untuk membeli hasil produksi. Dengan kata lain tingkat besar kecilnya pengeluaran yang terlaksana dalam masyarakat bersangkutan”.

Berdasarkan definisi tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa pendapatan masyarakat merupakan sejumlah uang yang diterima oleh seseorang atau masyarakat



baik yang berasal dari kegiatan usaha maupun prestasi kerjanya sehingga dapat digunakan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan desain penelitian eksploratif dengan pendekatan kualitatif. Data yang hendak dikumpulkan adalah tentang studi proses pemberdayaan pengrajin lurik batik dengan perbandingan pendekatan One Village One Product yang telah dikembangkan selama ini. Penelitian kualitatif tersebut dipilih dengan pertimbangan bahwa dengan melalui penelitian kualitatif diharapkan akan mampu mengkaji masalah penelitian secara mendalam, sehingga dapat memperoleh dan mempermudah penjelasan yang bermakna tentang studi ini.

Adapun alasan peneliti menggunakan metode kualitatif dalam penelitian ini yaitu untuk lebih menjelaskan pemaparan berdasarkan fakta-fakta yang nyata dengan cara pengumpulan data-data yang akurat berdasarkan wawancara dengan pihak yang terkait mengenai studi pemberdayaan pengrajin lurik oleh pemerintah melalui pendekatan OVOP.

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

Pemberdayaan Pengrajin Lurik Batik melalui Pendekatan *One Village One Product* dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Desa di Kabupaten Klaten

Seiring Kerajinan Lurik Batik yang terpilih menjadi produk unggulan Kabupaten Klaten khususnya Lurik Batik di Desa Jambakan, Pemerintah Kabupaten Klaten kemudian menetapkan Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2010 Pasal 23 Ayat (9) tentang Pakaian Dinas Harian Batik dan Tenun Tradisional atau Lurik ATBM dan Keputusan Bupati Klaten Nomor: 065/1014/06 tanggal 30 Desember 2010 tentang Mengenakan Tenun Tradisional, Motif, Warna maupun Model Bebas dengan Atribut. Penetapan produk unggulan tersebut diperkuat dengan diterbitkannya Instruksi Gubernur Jawa Tengah nomor 518/23546 tahun 2011 tentang Pengembangan Produk Unggulan Daerah Perdesaan Melalui Pendekatan *One Village One Product*(OVOP) Berbasis Koperasi Di Provinsi Jawa Tengah.

Selanjutnya berdasarkan Keputusan Bupati Klaten Nomor 050/84 Tahun 2016 tentang Produk Unggulan Kabupaten Klaten menyebutkan lurik batik menjadi salah satu produk unggulan dari Kabupaten Klaten. Dengan diterbitkannya aturan-aturan tersebut memudahkan Pemerintah Kabupaten Klaten dalam melaksanakan pemberdayaan Pengrajin Lurik Batik yang diharapkan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat Desa Jambakan yang merupakan Pengrajin Lurik Batik.

Berikut peneliti uraikan pemberdayaan Pengrajin Lurik Batik melalui pendekatan *One Village One Product (OVOP)* dalam meningkatkan pendapatan masyarakat di Desa Jambakan Kecamatan Bayat Kabupaten Klaten berdasarkan kajian teoritis dan hasil wawancara yang peneliti peroleh sebagai berikut:

a) Pemungkinan



Proses pemberdayaan pengrajin lurik batik khususnya di Desa Jambakan dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Klaten dengan selalu berupaya menciptakan situasi dan kondisi yang stabil khususnya pada aspek perekonomian sehingga para pelaku usaha terutama Pengrajin Lurik Batik dapat melaksanakan usahanya dengan nyaman serta meningkatkan minat para investor untuk menanamkan modal di Kabupaten Klaten. Selanjutnya, dengan situasi dan kondisi yang stabil tersebut Pemerintah Kabupaten Klaten mengajak Pengrajin Lurik Batik untuk dapat lebih aktif mengembangkan potensi Lurik Batik khususnya dalam segi desain Lurik Batik sehingga menarik minat para pembeli serta meningkatkan harga jual dari Lurik Batik itu sendiri maupun mengembangkan proses pemasarannya.

b) Penguatan

Pemerintah Kabupaten Klaten melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kepada para pengrajin Lurik Batik untuk meningkatkan kualitas keterampilan, keahlian serta pengetahuan. Dengan diselenggarakannya pendidikan dan pelatihan tersebut para pengrajin mampu mencari solusi secara lebih mandiri atas permasalahan-permasalahan yang dihadapi secara langsung. Sehingga penetapan Lurik Batik sebagai salah satu produk unggulan Kabupaten Klaten dalam program One Village One Product (OVOP) dapat terus bersaing guna meningkatkan kesejahteraan para pengrajin.

c) Perlindungan

Pemerintah Kabupaten Klaten berupaya memberikan perlindungan kepada Produk Lurik Batik khususnya dari produksi Alat Tenun Bukan Mesin (ATBM) dengan menetapkan peraturan serta keputusan tentang penggunaan pakaian dinas dari Lurik Batik. Selain bertujuan untuk melestarikan Lurik Batik yang merupakan produk asli Kabupaten Klaten juga untuk meningkatkan kesejahteraan para pengrajinnya yang sebagian besar merupakan masyarakat desa yang perlu untuk diberdayakan. Penetapan aturan tersebut merupakan salah satu wujud keberpihakan Pemerintah Kabupaten Klaten dalam membantu dan mendukung peningkatan kesejahteraan pengrajin Lurik Batik ATBM. Aturan tersebut juga didukung dengan penetapan Produk Lurik Batik sebagai salah satu produk unggulan Kabupaten Klaten dalam program One Village One Product (OVOP) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tahun 2011. Sehingga upaya pelestarian atas produk lokal dapat terus berjalan serta mampu memberdayakan para pengrajin Lurik Batik.

d) Penyokongan

Pemerintah Kabupaten Klaten melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM telah mengupayakan dukungan kepada para pengrajin Lurik Batik dalam proses pemberdayaan dengan memberikan bantuan berupa peralatan maupun modal. Hal tersebut dilakukan guna memberikan kesempatan kepada pengrajin yang sedang merintis usahanya maupun bagi pengrajin yang



hampir mengalami kebangkrutan dan terancam menutup usahanya untuk dapat kembali berkarya dan berproduksi. Selain itu juga bertujuan untuk melestarikan budaya asli turun temurun Kabupaten Klaten dalam menghadapi persaingan yang semakin berat sehingga dapat terus bertahan dan tidak hilang.

e) **Pemeliharaan**

Penyelenggaraan karnaval budaya oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Klaten bertujuan untuk terus memelihara dan melestarikan *Lurik Batik* didalam persaingan yang semakin sulit. Sehingga pengrajin *Lurik Batik* menjadi lebih berdaya dan kesejahteraannya dapat lebih ditingkatkan. Selain event tersebut juga dilaksanakan program studi banding bagi pengrajin untuk dapat mengetahui kekurangan dan kelebihan yang pengrajin miliki untuk dapat lebih meningkatkan kualitas dan menjadi inspirasi dalam menciptakan motif *Lurik Batik* yang baru.

Pendekatan *One Village One Product* (OVO) dalam Pemberdayaan *Lurik Batik*

Pemerintah Kabupaten Klaten dalam memberdayakan masyarakat Desa Jambakan Kecamatan Bayat Kabupaten Klaten dan selanjutnya dikembangkan melalui pendekatan *One Village One Product* (OVOP) yaitu dengan menetapkan produk *Lurik Batik* ATBM (Alat Tenun Bukan Mesin) sebagai produk unggulan Kabupaten Klaten yang diproduksi oleh pengrajin *Lurik Batik* Desa Jambakan. Sehingga dengan pendekatan OVOP tersebut memudahkan Pemerintah Kabupaten Klaten dalam melaksanakan pemberdayaan pengrajin, mengontrol ketersediaan *Lurik Batik*, mengawasi harga jual *Lurik Batik* dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Jambakan. Pemberdayaan Pengrajin *Lurik Batik* melalui pendekatan *One Village One Product* (OVOP) dengan penetapan Desa Jambakan sebagai salah satu penghasil *Lurik Batik* di Kabupaten Klaten mampu secara bertahap meningkatkan pendapatan yang diperoleh para pengrajin di Desa Jambakan. Setelah pendekatan OVOP dilaksanakannya para pengrajin merasakan secara tidak langsung permintaan *Lurik Batik* Desa Jambakan bertambah. Selain itu dengan adanya OVOP mampu menaikkan standar harga jual *Lurik Batik* sehingga pendapatan dari para pengrajin ikut bertambah. Namun masih terdapat kekurangan terutama dalam hal administrasi keuangan yang belum mereka miliki.

Faktor Penghambat dalam Pemberdayaan Pengrajin *Lurik Batik*

a) **Keterbatasan Anggaran**

Anggaran yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten Klaten kepada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM untuk pemberdayaan pengrajin *Lurik Batik* memang terbatas. Sedangkan pemberdayaan yang dilaksanakan pengrajin *Lurik Batik* membutuhkan dana yang tidak sedikit. Belum lagi anggaran yang terbatas tersebut juga harus dibagi untuk memberdayakan pengrajin lain yang ada di Kabupaten Klaten. Sehingga



pemberdayaan pengrajin Lurik Batik masih belum dapat dilaksanakan secara optimal dan merata bagi seluruh pengrajin Lurik Batik yang ada.

b) Bahan Baku

Keterbatasan bahan baku merupakan permasalahan yang harus dihadapi oleh pengrajin Lurik Batik, yang seharusnya kebutuhan terhadap bahan baku Lurik Batik yang berkualitas mampu disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Klaten melalui Koperasi yang ada. Karena hingga saat ini pemenuhan kebutuhan terhadap bahan baku Lurik Batik yang berkualitas masih harus mendatangkan bahan baku dari Luar Kabupaten Klaten. Hal tersebut akhirnya menyebabkan munculnya permasalahan lain yaitu meningkatnya biaya produksi serta waktu produksi yang menjadi semakin lama karena menunggu bahan baku.

c) Sumber Daya Manusia

Para pengrajin Lurik Batik memiliki kualitas yang masih rendah baik pada sisi inovasi dan kreatifitas dalam menciptakan motif baru maupun pada sisi kerapian hasil Lurik Batik yang berbeda dari satu pengrajin dengan pengrajin lainnya. Selain itu ketersediaan jumlah pengrajin Lurik Batik yang terbatas cukup menyulitkan dalam memenuhi permintaan terhadap Lurik Batik yang semakin meningkat.

d) Sarana dan Prasarana

Para pengrajin Lurik Batik masih menggunakan peralatan sederhana yang beberapa diantaranya merupakan hasil rakitan sendiri menggunakan bahan seadanya yang mereka miliki. Selain itu tidak semua pengrajin memiliki peralatan yang lengkap untuk menghasilkan produk Lurik Batik.

e) Pola Pikir

Pemikiran pengrajin Lurik Batik yang sebagian masih beranggapan bekerja demi memenuhi kebutuhan sehari-hari cukup menyulitkan dalam proses pemberdayaan Lurik Batik ATBM di Desa Jambakan Kabupaten Klaten. Rasa cepat puas dan menerima apa saja yang telah didapat ketika produk Lurik Batiknya telah terjual dan dapat diterima oleh konsumen.

f) Pemasaran

Pemasaran produk Lurik Batik yang dilakukan oleh para pengrajin dilakukan langsung ditempat produksinya dan hanya sebagian yang sudah memiliki tempat pemasarannya sendiri. Akses menuju tempat pemasaran ataupun produksi tersebut cukup jauh dari jalan raya sehingga menyulitkan konsumen untuk membeli Lurik Batik.

Tindak Lanjut dalam Menghadapi Faktor Penghambat Pemberdayaan Pengrajin Lurik Batik

a) Keterbatasan Anggaran

Keterbatasan anggaran yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten Klaten disikapi oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM dengan mengambil kebijakan kerjasama khususnya bersama pihak swasta untuk bersedia



menanamkan modal atau mendanai program/kegiatan pemberdayaan pengrajin Lurik Batik. Namun tidak melupakan aspek bantuan yang dapat diperoleh dengan pengajuan anggaran kepada Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi.

b) Bahan Baku

Upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan atas keterbatasan bahan baku Lurik Batik di Kabupaten Klaten oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM yaitu mengkoordinasikan dan bekerjasama dengan daerah lain untuk bersedia menyediakan pasokan bahan baku serta memudahkan perijinan bagi pengusaha dari Kabupaten Klaten. Bagi para pengrajin Lurik Batik berusaha untuk mendatangkan bahan baku dari luar Kabupaten Klaten.

c) Sumber Daya Manusia

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM dalam mengatasi masih rendahnya inovasi dan kreatifitas dari pengrajin dalam menciptakan motif baru serta perbedaan tingkat keahlian yang dimiliki masing-masing pengrajin dengan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kepada para pengrajin Lurik Batik.

d) Sarana dan Prasarana

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM telah mengupayakan untuk menyiapkan bantuan peralatan bagi pengrajin yang telah memenuhi persyaratan. Selain itu disiapkan juga bantuan dalam bentuk modal sehingga diharapkan mampu digunakan untuk mengembangkan usahanya.

e) Pola Pikir

Untuk dapat merubah pola pikir dari pengrajin yang sudah terbentuk hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya sudah cukup maka Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Klaten telah mengupayakan penyelenggaraan sosialisasi bagi seluruh pengrajin. Dengan adanya pemberian sosialisasi tersebut yang disisipkan pemberian motivasi mampu memberikan semangat kepada pengrajin sehingga sedikit demi sedikit mampu merubah pola pikir pengrajin. Selain itu disiapkan juga program studi banding bagi pengrajin sebagai hadiah kepada pengrajin yang berprestasi maupun yang mampu memberdayakan pengrajin disekitarnya.

f) Pemasaran

Dalam rangka mengatasi permasalahan pada aspek pemasaran Lurik Batik, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Klaten telah menyelenggarakan karnaval budaya Lurik Batik serta berupaya menyediakan pusat penjualan terpadu.

PENUTUP

Pemberdayaan Pengrajin Lurik Batik melalui pendekatan *One Village One Product (OVOP)* dalam meningkatkan pendapatan masyarakat Desa Jambakan Kecamatan Bayat Kabupaten Klaten telah terlaksana cukup optimal. Hal ini tampak pada aspek a) Pemberdayaan Pengrajin Lurik Batik; Pendekatan OVOP dalam



Pemberdayaan Batik Lurik. Pemungkinan. Pemerintah Kabupaten Klaten hendaknya dalam mengupayakan situasi perekonomian yang stabil untuk dapat melakukan evaluasi sehingga semakin lama akan semakin baik serta diharapkan untuk dapat melakukan monitoring atas pengembangan Lurik Batik baik pada aspek desain maupun pemasarannya sehingga seluruh pengrajin dapat melakukannya. Selain itu, Penguatan. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Klaten hendaknya mampu merencanakan dan mengatur secara proporsional siapa saja pengrajin Lurik Batik yang menerima pendidikan dan pelatihan tersebut sehingga pengrajin yang telah menerima pendidikan dan pelatihan tersebut mampu untuk membagi ilmu yang diterimanya kepada pengrajin lainnya karena dihadapkan dengan keterbatasan tenaga pendidik serta anggaran yang ada; Melakukan promosi serta menyelenggarakan *workshop* Lurik Batik untuk menarik minat para investor agar bersedia melakukan kerjasama dengan para pengrajin secara langsung maupun menanamkan modal di Kabupaten Klaten.

DAFTAR PUSTAKA

- Anatan, Lina dan Lena Ellitan. 2009. *Strategi Bersaing*. Bandung: Alfabeta
- Anwas, Oos M. 2014. *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global*. Bandung: Alfabeta.
- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta
- _____, Suharsimi. 2013. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta
- Azwar, Saifuddin. 2011. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Bryson, John M. 2008. *Perencanaan Strategis Bagi Organisasi Sosial*. Penerjemah: M. Miftahuddin. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Budiono. 1992. *Teori Pertumbuhan Ekonomi, Seri Sinopsis Pengantar Ilmu Ekonomi*. Yogyakarta: BPFE
- Bungin, M. Burhan. 2011. *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana
- David, Fred R. 2012. *Strategic Manajement, Manajemen Strategis Konsep*. Jakarta: Salemba
- Effendi, Ahmad Zarkasi. Dkk. 2012. *Demokrasi Ekonomi*. Malang: Program Sekolah Demokrasi
- Fauzi, Akhmad. 2010. *Ekonomi Perikanan: Teori, Kebijakan, dan Pengelolaan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Umum
- Gunawan, Imam. 2015. *Metode Penelitian Kualitatif, Teori dan Praktik*. Jakarta : Bumi Aksara
- Hikmat, Harry. 2010. *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: Humanoria
- Mardikanto, Totok dan Poerwoko Soebiato. 2013. *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Moleong, Lexy J. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya



- Nazir, Moh. 2014. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Noor, Juliansyah. 2014. *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*. Jakarta: Prenadamedia Group
- Rangkuti, Freddy. 1997. *Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- _____. 2014. *Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Salusu, J. 2008. *Pengambilan Keputusan Strategik untuk Organisasi Publik dan Organisasi Nonprofit*. Jakarta: PT Grasindo
- Sedarmayanti. 2014. *Manajemen Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi, dan Manajemen Negeri Sipil*. Bandung: PT. Refika Aditama
- Silalahi, Ulber. 2012. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: refika Aditama
- Sugiyama, A.Gima. 2013. *Manajemen Aset Pariwisata: Pelayanan Berkualitas agar Wisatawan Puas dan Loyal*. Bandung: Guardaya Intimarta
- Sugiyono. 2013. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- _____. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Suharto, Edi. 2014. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial & Pekerjaan Sosial*. Bandung: PT. Refika Aditama
- Soekanto, Soerjono. 2012. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Solihin, Ismail. 2012. *Manajemen Strategik*. Jakarta: Erlangga
- Sukirno, Sadeno. 2006. *Ekonomi Pembangunan*. Jakarta: Prenada Media
- Sumaryadi, I.Nyoman. 2005. *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom & Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Citra Utama
- _____. 2010. *Sosiologi Pemerintahan, Dari Perspektif Pelayanan, Pemberdayaan, Interaksi dan Sistem Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Sumodiningrat, Gunawan dan Ari Wulandari. 2015. *Menuju Ekonomi Berdikari: Pemberdayaan UMKM dengan Konsep OPOP-OVOP-OVOC*. Yogyakarta: Media Pressindo
- Sutopo, HB. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif*. Surakarta: UNS Press.
- Tambunan, Tulus T.H. 2009. *UMKM di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Theresia, Aprillia. Dkk. 2014. *Pembangunan Berbasis Masyarakat*. Bandung: Alfabeta
- Triton PB. 2011. *Manajemen Strategis, Terapan Perusahaan dan Bisnis*. Jakarta: Oriza
- Wasistiono, Sadu. 2001. *Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: CV Fokusmedia
- Yusuf, Muri. 2014. *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Prenadamedia Group

